



# PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN NASIONAL TAHUN 2022



**PUSAT PENYULUHAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM**





# PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN NASIONAL TAHUN 2022





**PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN NASIONAL  
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA  
PUSAT PENYULUHAN  
JAKARTA, APRIL 2021**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2022 ini dapat tersusun. Programa penyuluhan ini disusun sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan kehutanan, selain itu bisa dijadikan juga sebagai bahan masukan penyusunan perencanaan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di tingkat Pusat.

Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2022 ini disusun berdasarkan kondisi terkini sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya penunjang serta analisa permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2022 ini. Semoga programa ini dapat terintegrasi di dalam penganggaran Pusat Penyuluhan dan menjadi acuan bagi Penyuluh Kehutanan dalam menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Kehutanan.



Jakarta

April 2021

*Mull*  
Ir. Mariana Lubis, MM

NIP. 19621112 199101 2 001



**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN NASIONAL**  
**TAHUN 2022**

Koordinator Penyuluh  
Kehutanan



Firmansyah, S.Hut, M.Si  
NIP. 19831007 200912 1 005



Kepala Pusat Penyuluhan

Ir. Mariana Lubis, MM  
NIP. 19621112 199101 2 001

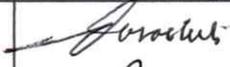
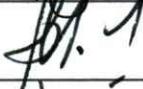
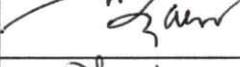
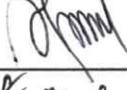
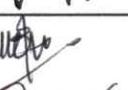
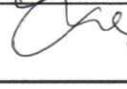


Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia,

Ir. Helmi Basalamah, MM  
NIP. 19611119 198802 1 001



## PENYUSUN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Endang Dwi Hastuti, MM	Penyuluh Kehutanan Madya	
2	Murtado, S.Hut, MP	Penyuluh Kehutanan Madya	
3	Ir. Rita Marsi	Penyuluh Kehutanan Madya	
4	Ir. Victor Winarto, ME	Penyuluh Kehutanan Madya	
5	Dr. Hendro Asmoro, SST, M.Si	Penyuluh Kehutanan Madya	
6	Siwi Tri Utami, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Madya	
7	Ernita Mery Theresia, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Madya	
8	Feri Ichwansyah, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Madya	
9	Firmansyah, S.Hut, M.Si	Penyuluh Kehutanan Muda	
10	Eli Sugianto, S. Hut, M.Si	Penyuluh Kehutanan Muda	
11	Nden Rissa Hadikusuma, S.Si, M.Si	Penyuluh Kehutanan Pertama	
12	Handari Karmelita, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Pertama	
13	Rusmalia, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Pertama	



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PENYUSUN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	4
C. Pengertian-Pengertian.....	6
II. MATRIKS.....	8
III. PENUTUP.....	14



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Tahun 2021 lebih ditekankan kepada percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Terdapat empat fokus kegiatan yang diprioritaskan Tahun 2021 yaitu ; (1) Penanganan kesehatan yaitu penanganan Pandemi Covid-19 dengan vaksinasi; (2) Perlindungan sosial terutama kelompok kurang mampu dan rentan; (3) Program pemulihan ekonomi, terutama dukungan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan dunia usaha dengan pertimbangan aspek lingkungan dan kehutanan; dan (4) Membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural baik kesehatan Pendidikan, perlindungan sosial dan bidang lainnya. Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19.

Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RPJMN 2020-2024 yang didukung oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM diintegrasikan dalam prioritas nasional : 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, 2) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan 3) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan kehutanan saat ini lebih menitikberatkan kepada peningkatan kualitas SDM yang memiliki daya saing dan kesempatan kepada masyarakat sebagai pelaku utama untuk berperan serta dalam pengelolaan sumber daya hutan secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Salah satu program prioritas nasional Pemerintahan Republik Indonesia dalam pembangunan kehutanan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pemanfaatan kawasan hutan adalah Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial membuka peluang masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat untuk mendapatkan akses pengelolaan hutan lestari di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, capaian izin perhutanan sosial sampai dengan Desember 2020, realisasi berjumlah 4.417.937,72 Ha atau sekitar 895.769 KK, dengan jumlah SK izin/Hak 6.798 Unit. Adapun realisasi per skema adalah sebagai berikut:

1. Hutan Desa	: 1.656.161,15 Ha
2. Hutan Kemasyarakatan	: 792.398,64 Ha
3. Hutan Tanaman Rakyat	: 353.861,68 Ha
4. Kemitraan Kehutanan	: a. Kulin KK 437.739,76 Ha; b. IPHPS 30.119,49 Ha
5. Hutan Adat	: 1.147.657,00 Ha

Selain perhutanan sosial, percepatan dan penanganan tuntas program-program atau agenda HINTS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Tanah Obyek Reforma Agraria, Mitra Konservasi, HTI/HTR, pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Penyuluhan Kehutanan dalam RPJMN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 juga mendukung Program Prioritas Nasional yaitu ;1) Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, 2) Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan dengan Program Prioritas Nasional Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan. Program prioritas tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam kegiatan Pusat Penyuluhan tahun 2021 yaitu 1) KTH Mandiri, 2) Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya), 3) Pengembangan LP2UKS, dan 4) Penyuluh dan/atau pendamping yang handal. Disamping itu Pusat Penyuluhan juga mendukung 28 prioritas kerja Menteri LHK yang beberapa diantaranya meliputi : 1) Food Estate, 2) Mangrove, 3) Karbon, 4) Datasering Hutan Sosial.

Berdasarkan data pada Pusat Penyuluhan sampai bulan Februari 2021, Kelompok Tani Hutan Kelas Pemula sebanyak 24.770 KTH, Kelompok Tani Hutan Kelas Madya sebanyak 2.126 KTH, Kelompok Tani Hutan Kelas Utama sebanyak 18 KTH, Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) Wanawiyata Widyakarya sebanyak 106 unit, fasilitasi pembentukan dan pengembangan koperasi sebanyak 98 unit, dan fasilitasi pengembangan Kelompok Tani Hutan menuju Kelompok Tani Hutan Mandiri sebanyak 100 KTH.

Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan Hutan dalam pembangunan kehutanan sangat penting karena kondisi sosial ekonomi sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal di dalam dan sekitar Kawasan Hutan masih tergolong rendah. Berdasarkan data strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Tahun 2020, luas Kawasan Hutan di Indonesia seluas 125.922.475,73 hektar yang terdiri dari Kawasan Konservasi Perairan 5.321.321 hektar, Kawasan Konservasi Daratan 22.108.831 hektar, Hutan Lindung 29.661.315,37 hektar, Hutan Produksi Terbatas 26.787.910,70 hektar, Hutan Produksi Tetap 29.220.318,67 hektar, Hutan Produksi yang dapat dikonversi 12.822.778,99 hektar. Saat ini, tercatat 25.863 desa di dalam dan disekitar kawasan hutan yang terdiri dari 9,2 juta rumah tangga. Terdapat 1,7 juta rumah tangga yang ada di kawasan hutan yang masuk dalam kategori keluarga miskin padahal masyarakat tersebut tinggal dekat dengan sumberdaya alam.

Penyuluh Kehutanan dalam konteks pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, diharapkan hadir ditengah masyarakat sebagai bentuk kehadiran negara dalam pembangunan daerah pinggiran di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Terkait hal tersebut, Penyuluh Kehutanan memiliki peran strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat, karena Penyuluh Kehutanan bukan saja berperan dalam pra kondisi masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, namun Penyuluh Kehutanan juga mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat yang berbasis

pembangunan kehutanan.

Pandemi covid 19 telah membuat perubahan yang mendasar dalam berbagai sektor kegiatan, salah satunya kegiatan penyuluhan. Penyuluh Kehutanan harus dapat melakukan berbagai penyesuaian agar dapat melakukan aktivitas penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat binaan dengan lebih efektif dan efisien. Penyuluh diharapkan dapat lebih sering menggunakan dan memanfaatkan media online/daring dalam membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat dampingan.

Dalam rangka mendukung pembangunan kehutanan saat ini terdapat SDM Penyuluh Kehutanan sebanyak 9.283 orang terdiri dari 2.755 orang Penyuluh Kehutanan PNS, 986 orang Penyuluh Kehutanan Swasta dan 5.542 orang Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (Pusat penyuluhan, Februari 2021). Untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Penyuluh Kehutanan dalam mencapai tujuan penyuluhan, maka Penyuluh Kehutanan wajib menyusun program penyuluhan kehutanan.

Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Nasional disusun dengan tujuan:

1. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan.
2. Sebagai bahan pertimbangan penyusunan rencana kegiatan Pusat Penyuluhan.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan adalah:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2009 tentang Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 61/MenLHK-II/2015 tentang Wanawiyata Widyakarya.
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016, tentang Perhutanan Sosial;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017, tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018, tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan;

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.13/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019, tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 73 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
20. Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim nomor P.5/PPI/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat.
21. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor: P.4/P2SDM/SET/KUM.1/10/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kelompok Tani Hutan.
22. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Nomor: P.5/P2SDM/SET/KUM.1/7/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor: P.4/P2SDM/SET/KUM.1/10/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kelompok Tani Hutan.
23. PermenLHK Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari.

### C. Pengertian-Pengertian

1. Apresiasi Wana Lestari adalah suatu kegiatan pemberian penghargaan dari pemerintah kepada perorangan, kelompok, aparatur pemerintah atau badan usaha atas prestasi yang dicapai berdasarkan inisiatif dan partisipatif dalam menjalankan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Demonstrasi Percontohan (Demplot) adalah suatu metode penyuluhan kehutanan kepada petani dengan cara membuat lahan percontohan, agar petani bisa melihat dan membuktikan terhadap objek yang didemonstrasikan.
3. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan.
4. Koperasi Kelompok Tani Hutan (KKTH) adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha kehutanan dan didirikan oleh pelaku utama kehutanan.
5. Lomba Wana Lestari adalah salah satu metode penyuluhan yang dilaksanakan untuk menetapkan perorangan, kelompok atau aparatur pemerintah yang berprestasi dalam memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan melalui mekanisme penilaian tertentu.
6. Materi Penyuluhan adalah bahan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.
7. Metode penyuluhan adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh Penyuluh Kehutanan.
8. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha kehutanan.
9. Pelaku Utama Kegiatan Kehutanan (pelaku utama) adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan beserta keluarganya.
10. Pendampingan adalah aktifitas penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus pada kegiatan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
11. Penyuluh Kehutanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis di bidang penyuluhan kehutanan.
12. Penyuluh Kehutanan Swasta yang selanjutnya disebut PKS adalah Penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau Lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
13. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut PKSM adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

14. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat.
15. Prasarana penyuluhan adalah barang atau benda tidak bergerak yang dimanfaatkan oleh Penyuluh Kehutanan sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan kehutanan.
16. Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis kegiatan penyuluhan kehutanan dalam satu tahun yang disusun secara sistematis sebagai bahan perencanaan pembangunan kehutanan.
17. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah Upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sitem penyangga kehidupan tetap terjaga.
18. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan (RKTPK) adalah rencana kegiatan yang disusun oleh Penyuluh Kehutanan PNS secara perorangan berdasarkan Programa Penyuluhan Kehutanan yang berisi kegiatan Penyuluhan Kehutanan yang akan dilakukan dalam satu tahun.
19. Sarana penyuluhan adalah barang atau benda bergerak yang dimanfaatkan oleh Penyuluh Kehutanan sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan kehutanan.
20. Sistem informasi pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan (SIMPING) adalah aplikasi berbasis daring/online yang berfungsi untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pendampingan dan hasil penyelenggaraan kegiatan pendampingan.
21. Sistem informasi manajemen penyuluhan (SIMLUH) adalah aplikasi berbasis daring/online yang berisi keterpaduan data kelembagaan, Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, Penyuluh Kehutanan Swasta, Kelompok Tani Hutan, dan sarana prasarana penyuluhan kehutanan.
22. Temu Karya adalah pertemuan sesama pelaku utama dan pelaku usaha untuk tukar menukar informasi, pengalaman dan gagasan dalam kegiatan pembangunan kehutanan.
23. Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya.



## II. MATRIKS

### MATRIKS PROGRAM PENYULUHAN KEHUTANAN NASIONAL TAHUN SOSS

NO	KEADAAN WILAYAH	TUJUAN	MASALAH	SASARAN PENYULUHAN				CARA MEMECAHKAN MASALAH				Penanggung Jawab
				Deskripsi Sasaran	Jumlah	Lokasi	Kegiatan Dan Waktu	Metode	Materi	Biaya (Sumber Dan Jumlah (Rp))	Pelaksana	
1	Penyusunan Program merupakan tugas pokok pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan	Menyiapkan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan	Belum tersusunnya Program Penyuluh Kehutanan Tahun 2022	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluh	13 orang	Jakarta dan Bogor	Menyusun Program Penyuluh Kehutanan Nasional tahun 2022 (Januari-April 2022)	Diskusi/FGD	P. 14/ MenLHK/ Setjen/ KUM.1/4/ 2019	84.000.000 APBN	PKA Pusat Penyuluh	Pusat Penyuluh
2	Penyusunan Rencana Kerja Penyuluh Kehutanan merupakan tugas pokok pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan	Menyiapkan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan sesuai bidang tugas dan wilayah kerjanya	Belum tersusunnya Rencana Kerja Penyuluh Kehutanan Tahun 2022	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluh	13 orang	Jakarta	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan (RKTPK) Tahun 2023 (Januari 2023)	Diskusi, Studi Literatur	P. 14/ MenLHK/ Setjen/ KUM.1/4/ 2019	Mandiri	PKA Pusat Penyuluh	Pusat Penyuluh
3	Terdapat KTH, penyuluh kehutanan PNS, PKSM dan PKS yang telah berhasil dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan	Memberikan apresiasi dan meningkatkan motivasi masyarakat, Penyuluh Kehutanan PNS, PKSM dan PKS untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kehutanan	Belum optimalnya pelaksanaan metode-metode penyuluhan dalam mengapresiasi masyarakat, Penyuluh Kehutanan PNS dan PKSM yang telah berhasil dalam pembangunan kehutanan	Pelaku utama, Penyuluh Kehutanan PNS, PKSM dan PKS	102 orang (4 kategori x 34 provinsi)	34 Provinsi	Lomba Wana Lestari Tahun 2022 (Juni-Agustus 2022)	Perlombaan	Permen LHK tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba Wana Lestari	350.000.000 APBN	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluh	Pusat Penyuluh
4	Terdapat KTH, Penyuluh Kehutanan PNS, PKSM dan PKS yang berprestasi sebagai pemenang lomba wana lestari	Sharing keberhasilan kegiatan pembangunan kehutanan	Pengalaman keberhasilan kegiatan pembangunan kehutanan di tingkat tapak belum dibagikan kepada berbagai pihak	Pemenang Lomba Wana Lestari	78 orang (6 orang x 13 kategori)	Jakarta	Temu Karya Pemenang Lomba tahun 2022 (Agustus 2022)	Temu karya	Profil keberhasilan Kegiatan pembangunan kehutanan	800.000.000 APBN	• Bidang Pengembangan Penyuluh • PKA Pusat Penyuluh	Pusat Penyuluh

NO	KEADAAN WILAYAH	TUJUAN	MASALAH	SASARAN PENYULUHAN				CARA MEMECAHKAN MASALAH				Penanggung Jawab
				Deskripsi Sasaran	Jumlah	Lokasi	Kegiatan Dan Waktu	Metode	Materi	Biaya (Sumber Dan Jumlah (Rp))	Pelaksana	
5	Terdapat Penyuluhan Kehutanan pada Pusat Penyuluhan yang mendampingi 34 Provinsi	Meningkatkan kapasitas SDM PKA Pusat Penyuluhan	Kapasitas SDM PKA Pusat Penyuluhan perlu ditingkatkan	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	13 orang	Jakarta/Bogor	Materi : 1. Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit sesuai P.73/2020 2. Sosialisasi PermenPAN 73/2020 dan Juknisnya 3. GIS 4. Multimedia dan teknik penulisan di media baik Media Cetak maupun Media Online (Januari – Desember 2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi</li> <li>Workshop / Writeshop</li> <li>Inhouse Training</li> </ul>	1. PermenPAN RB Nomor 73 Tahun 2020 dan Juknisnya 2. Pengenalan dan pembuatan Peta pada Aplikasi GIS Multimedia dan Teknik penulisan di media cetak maupun online	200.000.000 APBN	Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan
6	Terdapat kegiatan Pendampingan PEN	Melakukan evaluasi pendampingan PEN	Belum tersedianya data hasil pelaksanaan pendampingan PEN	Penyuluh Kehutanan Pendamping PEN	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Evaluasi kegiatan pendampingan PEN Provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi lapangan</li> <li>Data Sekunder</li> </ul>	Teknik fasilitasi partisipatif pendampingan masyarakat dan kelompok	75.000.000 APBN	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	Bidang Ketenagaan Pusat Penyuluhan
7	Terdapatnya program prioritas kerja Menteri KLHK. • Mangrove untuk konservasi lingkungan yang lebih baik • Aren merupakan salah satu produk unggulan HHHK yang sedang dikembangkan	Tersedianya Modul tentang Pengelolaan Mangrove dan Aren	Belum tersusunnya modul Sekolah lapang tentang mangrove dan aren	Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan	2 Modul	Jakarta	Penyusunan Modul Sekolah Lapang dengan topik/tema: 1. Mangrove 2. Aren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Studi Literatur</li> <li>Diskusi</li> </ul>	1. Pengelolaan Mangrove terkait budidaya, penanaman, pemeliharaan dan pengelolaan pasca panen 2. Budidaya arean dan pengelolaan pasca panen arean	60.000.000 APBN	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan

NO	KEADAAN WILAYAH	TUJUAN	MASALAH	SASARAN PENYULUHAN			CARA MEMECAHKAN MASALAH				Penanggung Jawab	
				Deskripsi Sasaran	Jumlah	Lokasi	Kegiatan Dan Waktu	Metode	Materi	Biaya (Sumber Dan Jumlah (Rp))		Pelaksana
8	Terdapat Penyuluh kehutanan dan kegiatan penyuluhan pada dinas provinsi	Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan	Masih kurangnya pelaksanaan evaluasi terkait kegiatan penyuluhan kehutanan di Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas LHK Provinsi</li> <li>KPH/CDK</li> <li>UPT KLHK</li> </ul>	34 Provinsi	34 Provinsi	Evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan (Januari s/d Desember 2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi</li> <li>Tinjauan Lapangan</li> </ul>	- Evaluasi terkait kegiatan Penyuluh Kehutanan, PKSM dan KTH	100.000.000 APBN	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan
9	Terdapat Organisasi Profesi Penyuluh Kehutanan	Penyusunan Kode Etik dan Kode Prilaku Profesi Penyuluh kehutanan	Belum tersusunya Kode Etik Perilaku Profesi Penyuluh Kehutanan	Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia	Penyuluh Kehutanan seluruh Indonesia	Jakarta/Bogor	Penyusunan Kode Etik dan Kode Prilaku Profesi Penyuluh Kehutanan	Diskusi FGD	Kode Etik Perilaku Profesi Penyuluh Kehutanan	50.000.000 APBN	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan
10	Pusat Penyuluhan memfasilitasi kegiatan : Pengembangan KTH Madya menuju KTH Mandiri; Pembentukan dan pengembangan wanawiyata widyarkarya, Pengembangan Koperasi KTH	Mengevaluasi hasil/ dampak dari kegiatan Fasilitasi Pengembangan KTH Madya menuju KTH Mandiri; Pembentukan dan pengembangan wanawiyata widyarkarya dan Koperasi KTH.	Kondisi KTH pasca pemberian fasilitasi kurang termonitor perkembangannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>KTH penerima fasilitasi pengembangan KTH Madya menuju KTH Utama tahun 2020-2021</li> <li>KTH penerima Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata Widyarkarya Tahun 2015-2021</li> <li>KTH penerima fasilitasi pembentukan dan pengembangan Koperasi KTH Tahun 2015-2020</li> </ul>	39 KTH	34 Prov	Kunjungan ke KTH, Evaluasi Online, (April-Desember 2022)	Wawancara, diskusi, kunjungan lapangan, Study Literatur, Study hasil evaluasi online	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panduan Evaluasi Kegiatan Fasilitasi Pengembangan KTH Madya menuju KTH Mandiri, Panduan fasilitasi Pembentukan dan pengembangan Wanawiyata widyarkarya dan Panduan fasilitasi Pembentukan dan pengembangan Koperasi KTH.</li> </ul>	100.000.000 APBN	PKA sesuai wilayah binaan	Bidang Kelembagaan Pusat Penyuluhan

		SASARAN PENYULUHAN					CARA MEMECAHKAN MASALAH					
NO	KEADAAN WILAYAH	TUJUAN	MASALAH	Deskripsi Sasaran	Jumlah	Lokasi	Kegiatan Dan Waktu	Metode	Materi	Biaya (Sumber Dan Jumlah (Rp))	Pelaksana	Penanggung Jawab
11	Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata/widyakarya/LP2UKS diarahkan menjadi Lembaga pelatihan nonformal berbasis komoditas	Menyusun Panduan Monev Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata/widyakarya/LP2UKS	Belum tersusunnya Panduan Monev Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata/widyakarya/LP2UKS	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	13 orang	Jakarta dan Bogor	Menyusun Panduan Monev Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata/widyakarya/LP2UKS (Januari-Maret 2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi</li> <li>FGD</li> <li>Writeshop/workshop</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>P.61 tahun 2015</li> <li>P.89 tahun 2018</li> </ul>	20.000.000 APBN	PKA Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan wilayah binaan Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan</li> <li>berdasarkan SK Kepala BP2SDM tentang pembagian wilayah kerja Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan</li> <li>Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan</li> <li>Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan dibagi ke dalam wilayah kerja 34 provinsi yang ditetapkan dengan SK Kepala BP2SDM</li> <li>Terdapat 3.283 orang terdiri dari 2.755 orang Penyuluh Kehutanan PNS, 986 orang Penyuluh Kehutanan Swasta dan 5.542 orang PKSM (Februari, 2021) yang berpotensi mendampingi kegiatan perhutanan social</li> </ul>	Tersedianya data KTH/ KUPS/ Penyuluh Kehutanan tiap provinsi untuk diekspos/ publikasi	Belum tersedianya data KTH/ KUPS/ Penyuluh Kehutanan yang unggulan	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	13 orang	34 provinsi	Membuat tulisan atau Infografis berupa Leaflet atau brosur tentang KTH/ KUPS/ serta Penyuluh Kehutanan unggulan yang akan dipublikasikan dengan media cetak, elektronik maupun online (Januari-Desember 2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi</li> <li>Koordinasi</li> <li>Wawancara</li> <li>writeshop</li> </ul>	Peraturan Menteri tentang Perhutanan Sosial pendampingan KTH	10.200.000 APBN	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan

CARA MEMECAHKAN MASALAH												
SASARAN PENYULUHAN					MATERI							
NO	KEADAAN WILAYAH	TUJUAN	MASALAH	Deskripsi Sasaran	Jumlah	Lokasi	Kegiatan Dan Waktu	Metode	Materi	Biaya (Sumber Dan Jumlah (Rp))	Pelaksana	Penanggung Jawab
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi Perhutanan Sosial pada Desember 2020 4.417.937,72 Ha</li> <li>Kelompok Tani Hututan Pemula sebanyak 24.770 KTH, KTH Madya sebanyak 2.126 KTH, KTH Utama sebanyak 18 KTH</li> </ul>											
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat PKA pada Pusat Penyuluhan</li> <li>Kebutuhan Materi Penyuluhan Kehutanan Elektronik dinamis dan</li> </ul>	Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan (studio mini)	Belum adanya sarana dan prasarana pembuatan materi penyuluhan elektronik	Penyuluh Kehutanan pada Pusat Penyuluhan	13 orang	Jakarta dan Bogor	Pembuatan sarana penyuluhan kehutanan berbasis elektronik (studio mini) Januari-Desember 2022)	Pengadaan sarana penyuluhan (studio mini) dan prasarana studio mini	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permen LHK 77/2016</li> </ul>	250.000.000 APBN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan</li> <li>Bidang Pengembangan Penyuluhan</li> </ul>	Bidang Pengembangan Penyuluhan Pusat Penyuluhan
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>terus berkembang Kegiatan Pembangunan Kehutanan dinamis dan</li> <li>berkembang sesuai dengan Rencana Kerja Prioritas Kementerian LHK</li> <li>IKK Pusat Penyuluhan</li> </ul>	Pengembangan Materi Penyuluhan Kehutanan media cetak dan elektronik	Terbatasnya materi penyuluhan berupa media cetak dan elektronik	Penyuluh Kehutanan pada Pusat Penyuluhan	13 orang	Jakarta dan Bogor	Pembuatan materi penyuluhan media cetak dan elektronik 1. Food Estate 2. Mangrove 3. Karbon 4. Persemaian Modern 5. Adaptasi Iklim, Proklam dan Climate Resilience	<ul style="list-style-type: none"> <li>FGD</li> <li>Diskusi</li> <li>Pembuatan Materi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prioritas Kerja Menteri LHK</li> <li>IKK Pusat Penyuluhan</li> </ul>	50.000.000 APBN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyuluh kehutanan Pusat Penyuluhan</li> </ul>	Bidang Pengembangan Penyuluhan Pusat Penyuluhan
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan fasilitasi penyuluhan kehutanan yang meliputi KTH Mandiri, Wanawiyata Widyakarya/LP2 UKS</li> </ul>	Pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi kegiatan penyuluhan kehutanan (KTH Mandiri, Wanawiyata Widyakarya/LP2 UKS)	Kurangnya pendampingan terhadap fasilitasi kegiatan penyuluhan kehutanan	KTH Utama/Mandiri, Wanawiyata Widyakarya /LP2UKS	34 Provinsi	34 Provinsi	Pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi kegiatan penyuluhan kehutanan (Januari-Desember 2022)	Pendampingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panduan Pendampingan Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan Kehutanan</li> </ul>	100.000.000 APBN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan</li> </ul>	Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pusat Penyuluhan

NO	KEADAAN WILAYAH	TUJUAN	MASALAH	SASARAN PENYULUHAN				CARA MEMECAHKAN MASALAH				
				Deskripsi Sasaran	Jumlah	Lokasi	Kegiatan Dan Waktu	Metode	Materi	Biaya (Sumber Dan Jumlah (Rp))	Pelaksana	Penanggung Jawab
16	Kelompok tani hutan sebagai wadah dalam rangka pengembangan usaha kelompok memiliki produk-produk unggulan yang bisa dipasarkan secara luas secara online maupun offline	Pengembangan aplikasi Forestamart sebagai salah satu cara memasarkan produk kelompok tani secara luas	Produk kelompok tani hutan yang belum terpasarkan secara maksimal	Produk Kelompok Tani Hutan	KTH di 34 Provinsi	KTH di 34 Provinsi	Pengembangan aplikasi forestamart menjadi aplikasi berbasis android yang terdaftar di play store dan app store (Januari-Desember 2022)	Pengembangan -an perangkat lunak	Aplikasi forestamart	150.000.000 APBN	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Pusat Penyuluhan





### **III. PENUTUP**

Dengan tersusunnya Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional ini diharapkan Penyuluh Kehutanan Ahli lingkup Pusat Penyuluhan, BP2SDM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam programa penyuluhan diharapkan dapat mendukung kegiatan Pusat Penyuluhan.







**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**